



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Narasumber
DISKUSI PUBLIK
”SAMPAH SERAPAH: AKAR MASALAH DAN SOLUSI TPST
PIYUNGAN”
Yogyakarta, 05 April 2019

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah; Dr. M Nurul Yamin, M.Si.
- Yang saya hormati, Para Narasumber;
- Bapak/Ibu, Tamu Undangan, Para Peserta Diskusi yang berbahagia,

Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat *Allah SWT*, karena hanya atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kita semua berada dalam keadaan sehat wal-afiat, sehingga pada hari ini dapat menghadiri Diskusi Publik “SAMPAH SERAPAH : Akar Masalah dan Solusi TPST Piyungan”, yang diselenggarakan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Saudara-saudara sekalian,

SAMPAH merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan dibuang atau ditumpuk begitu saja di tempat yang sudah disediakan tanpa diapa-apakan lagi. Dari hari ke hari sampah itu terus menumpuk dan terjadilah bukit sampah seperti yang sering kita lihat. Sampah yang menumpuk itu, sudah barang tentu akan mengganggu penduduk di sekitarnya.

Idealnya, dalam pengelolaan sampah kita harus bisa menerapkan prinsip-prinsip yang dikenal dengan nama 4R, yaitu *Reduce* (mengurangi); *Reuse* (menggunakan kembali); *Recycle* (mendaur ulang); dan *Replace* (mengganti). Selain itu, dalam pengelolaan sampah dan rangkaian pembuangan sampah setidaknya ada 9 poin penting yang juga harus mendapatkan perhatian kita bersama dan harus dilakukan, yaitu : 1. Pemilahan, 2. Pewadahan, 3. Pengumpulan, 4. Pengangkutan. 5. Daur Ulang, 6. Pengomposan, 7. Biogas, 8. Pembakaran, dan 9. Tempat pembuangan sampah.

Tetapi pada kenyataannya, banyak terjadi sampah sekadar ditumpuk dan ditimbun tanah (*sanitary landfill*). Seperti halnya yang terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Kita tidak menutup mata, itu yang terjadi hingga saat ini. Sampah yang selama ini dibawa ke TPST Piyungan hanya sebatas ditumpuk dan diurug, artinya belum ada langkah untuk pemusnahan sampah. Padahal kita ketahui bersama, sebenarnya TPST Piyungan sudah tidak bisa digunakan lagi sejak 2012 lalu, tetapi dengan berbagai upaya yang ada bisa bertahan.

Dengan penelitian terbaru, melihat luas lahan dan akar masalah sampah yaitu jumlah volume sampah yang selalu

meningkat, selanjutnya mengacu pada kajian yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, operasional maksimal TPST Piyungan hanya bisa bertahan hingga tahun 2020. Setelah itu TPST Piyungan sudah tidak bisa menampung sampah lagi, usianya juga sudah tidak bisa diperpanjang lagi.

Bapak/Ibu, Tamu Undangan serta Hadirin yang saya banggakan,

Tidak lama lagi, umur TPST Piyungan yang beroperasi sejak tahun 1995 ini akan segera berakhir. Sejumlah skenario harus sudah disiapkan pemerintah. Merujuk pada hasil kajian, sudah harus ada solusi, apakah mencari lokasi baru atau memanfaatkan teknologi untuk pengolahan sampah. Kalau setiap hari volume sampah bisa mencapai 600 ton, kiranya opsi untuk mengurangi volume sampah tentu bukan perkara mudah, bahkan solusi yang sulit direalisasikan. Tetapi juga bukan mengurai masalah kalau kita hanya berdiam diri tanpa memberikan jalan keluar, mengingat pengelolaan sampah di TPST Piyungan sebagai TPA terluas di DIY menjadi representasi potret pengelolaan sampah secara umum di daerah istimewa ini.

Untuk itu, sudah saatnya kita membenahi pengelolaan sampah secara menyeluruh agar wajah DIY benar-benar bersih dan tertata. Jauh dari kesan jorok yang tidak berkesudahan. Bisa jadi, kebijakan tatakelola sampah seharusnya lebih fokus untuk mengatasi akar permasalahannya, yaitu produksi sampah yang melimpah. Jangan sampai persoalan sampah seolah tak berujung, membuat darurat sampah seperti yang terjadi beberapa waktu lalu yang hampir saja melekat identik dengan DIY.

Beberapa masalah utama dalam pengelolaan sampah menjadi masalah bersama tiga wilayah administratif, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.

Permasalahan tersebut secara umum adalah tren volume sampah yang terus meningkat

Sejak beroperasi penuh pada tahun 1996 sampai sekarang, tren jumlah sampah terangkut terus meningkat. Konteks hari ini, kita tidak bisa lagi hanya dengan mengandalkan TPST Piyungan. Tentunya menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah sangat diperlukan, selain juga kontrol sosial budaya masyarakat untuk lebih menghargai lingkungan. Pemerintah dalam hal ini juga sangat mendesak membuat suatu regulasi berikut sangsi-sangsinya. Hal itu diharapkan bisa meminimalkan perusakan lingkungan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemusnahan sampah yang volumenya sudah melebihi kapasitas, secara permanen penggunaan teknologi bisa segera diterapkan. Kiranya sangat banyak dan beragam teknologi dari dalam dan luar negeri yang sudah tersedia. Kita hanya perlu keberanian untuk segera memilih pihak ketiga yang mampu dan sanggup melakukan pemusnahan dengan biaya paling rendah, yang bisa diajak kerjasama. Mengingat pemusnahan dengan teknologi membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika hal itu kemudian segera diwujudkan, sampah yang terus menumpuk, seiring dengan semakin habisnya usia teknis TPST Piyungan, permasalahan baru akibat sampah seperti polusi udara bau menyengat, sumber penyakit, pencemaran lingkungan, dan gangguan ketenteraman masyarakat bisa diminimalisir, karena kualitas lingkungan yang bersih dan sehat hanya dapat dicapai dengan pengelolaan sampah yang tepat dan benar.

Bapak/Ibu, Tamu Undangan serta Hadirin yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berdiskusi, semoga kegiatan ini bisa menghasilkan rekomendasi sebuah solusi guna mengurai permasalahan sampah di DIY,

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
RAPAT KERJA TEKNIS
KERJASAMA LUAR NEGERI
Yogyakarta, 10 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY;
- Para Narasumber;
- Para Peserta Rapat Kerja Teknis Kerjasama Luar Negeri;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada Rapat Kerja Teknis Kerjasama Luar Negeri dalam keadaan sehat wal'afiat. Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi Saya untuk dapat hadir dan berjumpa dengan Bapak/Ibu/Saudara sekalian.

Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang Saya hormati,

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini telah mendorong globalisasi dan saling ketergantungan

(*interdependence*) antar negara. Hal tersebut membuat hubungan antar negara makin tidak ada batas (*borderless*).

Menguatnya arus globalisasi juga membuat para pelaku hubungan internasional makin luas. Negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, tetapi meluas pada aktor-aktor lain selain negara, seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional, media, kelompok-kelompok minoritas, individu, bahkan pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah, sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, juga semakin berkepentingan dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak luar negeri. Namun harus dipahami bahwa hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah bagian dari hubungan luar negeri yang dilakukan oleh negara (pemerintah pusat).

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa politik luar negeri merupakan urusan pemerintahan absolut. Namun seiring dengan berlakunya Undang-undang otonomi daerah tersebut, kebijakan luar negeri oleh pemerintah pusat juga diarahkan untuk memberdayakan dan mempromosikan potensi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri yang lebih terarah, terpadu dan berlandaskan kepastian hukum yang lebih kuat, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua Undang-Undang dimaksud merupakan landasan hukum yang mengikat bagi Pemerintah Pusat dan pelaku Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri lainnya, termasuk unsur-unsur Daerah, dalam melaksanakan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri.

Dengan adanya aturan-aturan tersebut serta pembahasan dalam Rapat Kerja Teknis Kerjasama Luar Negeri kali ini, hendaknya Pemerintah Daerah sebagai salah satu dari aktor dalam hubungan kerjasama luar negeri, dapat memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kerjasama luar negeri untuk kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Namun demikian peluang kesempatan ini sudah semestinya dimanfaatkan dengan sangat bijaksana dengan mengingat pada aturan yang ada.

Akhir kata, dengan rasa syukur memohon ridho-Nya dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Rapat Kerja Teknis Kerjasama Luar Negeri, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 April 2019

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH DIY

Drs. TRI SAKTIYANA, M.Si.



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
BENCHMARKING TO BEST PRACTICE
DIKLATPIM TK. IV ANGKATAN XXIII
PROVINSI KALIMANTAN BARATTAHUN 2019

Yogyakarta, 10 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Rombongan *Benchmarking To Best Practice* Diklatpim Tk. IV Angkatan XXIII Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;
- Para Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia;

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bertemu dan berdiskusi dalam rangka kunjungan *Benchmarking To Best Practice* Diklatpim Tk. IV Angkatan XXIII Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan sehat wal'afiat.

Atas nama masyarakat serta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya menyampaikan ucapan “Selamat Datang” di Yogyakarta kepada seluruh rombongan yang telah berkenan untuk melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu dengan seoptimal mungkin.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Terkait dengan materi kunjungan kali ini, tentang studi referensi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dapat saya sampaikan bahwa SAKIP Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta seluruh OPD untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sekaligus juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja setiap instansi di tahun yang akan datang.

Semua ini merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Oleh karena itu, SAKIP sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negara kita. Karena dengan SAKIP maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

Untuk itulah, maka dalam kerangka penciptaan *good governance*, kondisi ideal yang dilaksanakan di DIY yaitu semua kegiatan organisasi pemerintahan telah dilaksanakan secara terarah dan terukur, termasuk kaitannya dengan kegiatan

pembinaan serta pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah DIY telah berhasil empat kali meraih predikat A dalam penilaian SAKIP, sehingga pada tahun 2019 ini Pemda DIY sukses meraih predikat AA dari Kementerian PAN dan RB RI, serta delapan kali berturut-turut Pemda DIY memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Demikian sekiranya sedikit gambaran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan ini. Berkaitan dengan materi kunjungan studi yang lebih mendalam, telah dipersiapkan data-data dan penjelasan secara rinci oleh OPD terkait. Untuk penjelasan lebih lanjut secara terperinci dan mendalam, Saya persilahkan untuk dapat membahasnya pada diskusi selanjutnya dengan OPD tersebut.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
DISPLAY KARNAVAL BUDAYA
SELENDANG SUTERA
Yogyakarta, 25 April 2019

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Hadirin dan Tamu Undangan, yang saya hormati;
Para Pelajar dan Mahasiswa, Para Pelaku Seni serta Warga Masyarakat Yogyakarta
yang saya banggakan,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pertama-tama saya sampaikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada para pelajar, mahasiswa dan para pelaku seni serta segenap komponen masyarakat lainnya yang telah ikut berpartisipasi pada Karnaval Budaya kali ini, semoga acara Karnaval Budaya ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,

Karnaval Budaya ini penting diselenggarakan sebagai representasi dari kearifan lokal bangsa kita, yang terus kita banggakan dan kembangkan. Karena di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya kerakyatan yang baik yaitu rasa cinta kepada alam, semangat gotong royong, pendidikan, keimanan, kesejahteraan dan sebagainya, yang dengan jelas telah digambarkan secara dinamis melalui perpaduan gerak dan irama khas serta nilai seni budaya Yogyakarta.

Karnaval Budaya ini sekiranya juga akan mendukung dan memperkuat posisi Yogyakarta sebagai pusat seni budaya, kota pendidikan serta kota pariwisata.

Sekaligus dapat sebagai proses sosialisasi nilai kehidupan, yang tidak saja dapat menciptakan suasana damai dalam masyarakat, tetapi pendekatan seni budaya telah melahirkan kesantunan, kelembutan, ketenangan batin serta harmoni di dalam masyarakat. Karena yang disentuh oleh seni budaya adalah dimensi batin atau rasa. Seni akan mengasah ketajaman batin dan rasa manusiawi sehingga lebih peka untuk menangkap essensi kehidupan serta nilai kemanusiaan yang sebenarnya.

Untuk itulah, hanya melalui kehendak untuk berkarya dan berbuat lebih baik, maka tentunya sukar diharapkan penyelenggaraan kegiatan yang dapat memiliki arti penting bagi pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik, dan bukan saja dilihat dari sisi kepentingan pelestarian dan pengembangan budaya lokal semata, namun juga dari sisi pengembangan kepariwisataan kita kedepan agar lebih baik dan maju.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Disamping itu, penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan akan menambah keragaman kreatifitas dan unjuk kerja bagi para pelajar, mahasiswa dan seniman serta seluruh warga masyarakat, secara optimal dan maksimal. Untuk itulah kegiatan ini mempunyai arti yang sangat strategis dan perlu kita dukung terus perkembangannya. Hal ini sesuai dengan semangat yang telah digariskan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, salah satunya yang memuat tentang kebudayaan.

Diharapkan pula masyarakat dapat lebih berapresiasi terhadap seni budaya lokal sendiri, karena hanya dengan semakin banyak masyarakat berapresiasi maka akan semakin berkembang pula seni budaya itu sendiri. Dan semakin banyak ragam seni budaya yang ditampilkan maka diharapkan akan menambah serta memperkuat posisi DIY sebagai pusat seni dan budaya di Indonesia, dengan budaya lokal yang diberi ruh baru serta spirit kemajuan.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini mampu memberikan manfaat bagi para pelajar, masiswa, seniman, budayawan dan masyarakat. Akhirnya dengan memanjatkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, Display Karnaval Budaya Selendang Sutera, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
FOCUS GROUP DISCUSSION
AUDIT TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
YOGYAKARTA DI KOTA YOGYAKARTA,
KAB. SLEMAN DAN KAB. BANTUL
Yogyakarta, 9 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 - Para Narasumber;
 - Para Peserta *Focus Group Discussion*;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara *Focus Group Discussion* Audit Tata Ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul dalam keadaan sehat wal'afiat. Merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk dapat hadir dan berjumpa dengan Bapak/Ibu/Saudara sekalian.

Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang Saya hormati,

Perkembangan suatu kota/kawasan tidak terlepas dari peran perancang tata ruang dan aturan pendukung yang berlaku. Penataan sebuah kota/kawasan dapat dikatakan gagal apabila antara tata ruang dan perancangannya tidak sehaluan, berjalan sendiri-sendiri, memiliki interpretasi yang berbeda, serta tata ruang itu sendiri gagal menangkap aspirasi dari masyarakat, terkait bagaimana seharusnya sebuah kota/kawasan dibangun.

Diperlukan adanya dialog perencanaan tata ruang yang dapat dimulai dari Pemerintah yang memiliki kewenangan regulasi, pengawasan, dan pemberi masukan untuk mewujudkan suatu ruang yang nyaman dan adil bagi seluruh masyarakat. Guna mewujudkan pembangunan kota/kawasan yang teratur, dukungan dari seorang pemimpin sangat diperlukan dalam hal ini. Pemimpin harus memiliki visi dan misi yang kuat untuk mewujudkan sebuah ruang yang aman, nyaman, dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Tantangan yang saat ini dihadapi oleh perancang kota/kawasan adalah bagaimana menciptakan sebuah kota/kawasan modern namun tidak meninggalkan ciri khasnya. Untuk menyikapi hal ini maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi lokal yang berkembang di masyarakat baik itu perilaku maupun tata caranya.

Hadirin sekalian,

Berkaitan dengan penataan ruang, tentunya diharapkan ada peraturan yang diterbitkan yang berkaitan terutama jika suatu daerah banyak terdapat bangunan cagar budaya. Sebagai contoh di Yogyakarta sendiri, telah ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelestarian Budaya sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun

2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya serta Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Kemudian ada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah yang menyatakan bahwa setiap bangunan yang akan dibangun di kawasan cagar budaya harus menyesuaikan dengan gaya arsitektur bangunan yang ada di kawasan tersebut sebagai salah satu upaya menjaga kelestarian kawasan budaya. Oleh karena itu, Pergub DIY ini dapat dijadikan pedoman untuk pembangunan Yogyakarta kedepan.

Adanya peraturan mengenai panduan perancangan dan penataan kota/kawasan merupakan langkah awal yang baik untuk menciptakan penyelenggaraan tata ruang secara konsisten. Selain itu, adanya penegakan hukum untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat sangatlah penting. Dari aturan yang sudah ada ini diharapkan dapat tercipta harmonisasi antara tata ruang dan arsitektur bangunan dalam mewujudkan sebuah ruang yang memiliki ciri khas suatu kota/kawasan.

Tata ruang yang tertata sesuai aturan mencerminkan nilai budaya, nilai-nilai sosial dan bahkan politik setempat. Tata ruang juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat dan pimpinannya, serta juga membentuk nilai-nilai dan cara pandang masyarakatnya. Pada akhirnya akan berlaku pepatah manusia membentuk lingkungannya, kemudian lingkungan tersebut membentuk manusianya.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridhonya dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, *Focus Group Discussion* Audit Tata Ruang Kawasan Perkotaan Yogyakarta di Kota Yogyakarta, Kab. Sleman dan Kab. Bantul, Saya nyatakan

dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
“KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI
DIY DALAM RANGKA Mendukung Pengembangan
PARIWISATA BOROBUDUR”
Yogyakarta, 25 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati,

- Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Para Narasumber;

Hadirin dan Para Peserta Diskusi sekalian yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan FGD Kebijakan Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan pariwisata Borobudur, mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita menyadari bahwa Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas wilayah. Namun, untuk

mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab. Maka penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, maka wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, dapat mencakup: kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif.

Dengan pendekatan wilayah administratif tersebut, penataan ruang seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah nasional, wilayah provinsi, wilayah kabupaten, dan wilayah kota, yang setiap wilayah tersebut merupakan subsistem ruang menurut batasan administratif. Di dalam subsistem tersebut terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan, dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda, sehingga apabila tidak ditata dengan baik maka dapat mendorong ke arah adanya ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah serta ketidaksinambungan pemanfaatan ruang.

Disamping itu, kebijakan pemanfaatan ruang akan berdampak pada lingkungan yang merupakan penyedia sumber daya itu sendiri. Sehingga sering menimbulkan konflik tersendiri

dalam penataan ruang. Untuk itulah diperlukan adanya kebijakan dalam mensinergikan penataan ruang dalam pembangunan berkelanjutan.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Dengan pengelolaan pertumbuhan wilayah yang terintegrasi antar sektor pembangunan, seperti potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang berpengaruh terhadap berbagai aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Maka saya menyambut baik FGD Kebijakan Penataan Ruang untuk mendukung pengembangan pariwisata Borobudur ini. Forum ini sangat penting sebagai media untuk menyepakati deliniasi wilayah Rencana Rinci Tata Ruang di sekitar otoritas badan Borobudur, tujuan dan tema serta isu-isu strategis wilayah perencanaannya.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
GELAR SENI BUDAYA YOGYAKARTA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HADEGING NAGARI NGAYOGYAKARTA
KE-272 TAHUN 2019

TMII Jakarta, 6 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Tamu Undangan serta Hadirin sekalian, yang saya hormati;

Tokoh Budaya serta Tokoh Masyarakat Yogyakarta;
Para Seniman, Budayawan serta Warga Masyarakat Yogyakarta di
Jakarta yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan *Gelar Seni Budaya Yogyakarta Tahun 2019*, dalam rangka memperingati *Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat Ke-272*, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Pertama-tama saya menyambut baik Gelar Seni Budaya Yogyakarta Tahun 2019 kali ini, kegiatan ini mempunyai nilai yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan promosi potensi daerah kepada masyarakat luas. Sekaligus sebagai media untuk memupuk, membudayakan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai adat dan budaya, serta seni yang ada di Yogyakarta.

Melalui tema “Budaya Adiluhung Yogyakarta Untuk Mendorong Persatuan dan Kesatuan NKRI”, diharapkan dapat membangkitkan kembali nilai-nilai budaya lokal/tradisional yang dulu tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta yang merupakan miniaturnya Indonesia dan dapat dicerminkan kearah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia secara luas. Sekaligus mendorong kreatifitas para seniman untuk terus berkreasi, dan juga menjadi media hiburan sehat, edukatif, dengan tanpa menghilangkan nilai kultural budaya bangsa sendiri.

Seni budaya tradisional penting untuk dilestarikan sebagai representasi dari nilai kearifan lokal Yogyakarta yang terus kita banggakan dan kembangkan sebagai ruh dalam tatanan bermasyarakat. Terkandung nilai-nilai budaya kerakyatan dan persatuan yang baik yaitu rasa cinta kepada alam, semangat gotong royong, pendidikan, keimanan, kesejahteraan dan sebagainya, yang dengan jelas telah digambarkan secara dinamis melalui perpaduan gerak dan irama khas Yogyakarta.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Dengan kegiatan Gelar Seni Budaya ini, diharapkan dapat semakin memacu semangat para seniman untuk terus berkarya dan berkreasi secara maksimal. Untuk itulah, tanpa adanya kehendak untuk berkarya dan berbuat lebih baik, maka tentunya sukar diharapkan terlaksananya penyelenggaraan kegiatan yang dapat memiliki arti penting seperti ini, bukan dilihat dari sisi kepentingan usaha saja, akan tetapi lebih jauh lagi bagi kepentingan potensi unggulan daerah khususnya bidang

pariwisata dan pelestarian serta pengembangan budaya bangsa, niscaya akan mempengaruhi upaya pencapaian keberhasilan kegiatan ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya, sehingga rangkaian kegiatan kali ini mampu memberikan manfaat bagi para pelaku seni serta masyarakat.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

TMII Jakarta, 6 April 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PAGELARAN WAYANG KULIT
SEMALAM SUNTUK “WAHYU KAMULYAN”
Anjungan DIY TMII Jakarta, 13 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yang saya hormati, Dalang Ki Seno Nugroho;
- Yang saya hormati, Para Tokoh; serta Pimpinan Masyarakat DIY di Jakarta,
- Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama Pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyambut baik pagelaran Wayang Kulit dengan lakon “Wahyu Kamulyan”. Yang diselenggarakan Badan Penghubung Daerah (Banhubda) Pemerintah Daerah DIY. Semoga pertunjukan ini, tidak sekedar menghadirkan tontonan saja, namun juga tuntunan, melalui cerita yang penuh filosofi dan ajaran luhur yang tercermin dari watak dan karakter tokoh-tokoh wayang yang mencerminkan kepribadian kita. Karena Wayang mempunyai

pengertian “*wewayanging ngaurip*” yang artinya gambaran kehidupan kita bersama.

Hadirin dan saudara-saudara sekalian,

Pemerintah Daerah DIY memegang teguh dasar filosofi dalam rangka melaksanakan pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan *nilai budaya daerah* yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Hakekat budaya adalah hasil *cipta, karsa dan rasa*, yang diyakini masyarakat sebagai sesuatu yang benar dan indah. Demikian pula budaya daerah di DIY, yang diyakini oleh masyarakat sebagai salah satu acuan dalam hidup bermasyarakat, baik ke dalam (*Intern*) maupun ke luar (*Extern*). Secara filosofis, budaya Jawa khususnya Budaya DIY dapat digunakan sebagai sarana untuk *Hamemayu Hayuning Bawana*. Ini berarti bahwa Budaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan masyarakat ayom ayem tata, titi, tentrem karta raharja. Dengan perkataan lain, budaya tersebut akan bermuara pada kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, baik ke dalam maupun ke luar.

Dengan dasar filosofi tersebut maka kondisi yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal,

effisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah. Berdasarkan kondisi ini maka ditetapkan langkah untuk menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam peran barunya Pemerintah Daerah DIY akan lebih diarahkan sebagai pengatur dan pengendali dari pada sebagai pelaksana langsung suatu urusan dan layanan. Hal ini didasarkan kepada pengalaman bahwa jika urusan-urusan yang dapat diselenggarakan sendiri oleh masyarakat, namun tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka akan menimbulkan ketergantungan kepada Pemerintah Daerah, sehingga kreativitas dan semangat inovasi masyarakat maupun individu anggota masyarakat menjadi lemah.

Dengan peranan baru ini Pemerintah Daerah lebih banyak memberi peluang kepada masyarakat dan stakeholders, untuk bersama-sama memikul suatu tanggung jawab atau urusan dengan cara memberikan kesempatan dan mendorong masyarakat dan stakeholders melalui regulasi, fasilitasi dan pelayanan (*public services*) agar dapat mengembangkan kreativitas dan inovasinya, sehingga dapat memberdayakan potensi daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin yang saya hormati,

Untuk itu, potensi kesenian wayang ini juga merupakan sesuatu yang sangat strategis untuk dikembangkan, karena tidak saja untuk membendung arus besar budaya populer yang cenderung mengesampingkan norma dan nilai kemanusiaan, akan tetapi seni pertunjukan wayang ini diharapkan dapat meminimalisasi pandangan yang sempit tentang nilai kehidupan serta kemanusiaan.

Wayang sekaligus dapat dipakai sebagai sarana kegiatan kita dalam memajukan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan dan demokrasi serta nilai-nilai kebangsaan. Sehingga harus dipertahankan keberadaannya. Artinya, tanggung jawab untuk mempertahankan khasanah seni budaya yang sudah ada sejak dulu adalah dengan sebanyak mungkin menampilkan pertunjukan-pertunjukan seni budaya di tengah masyarakat, sehingga seni budaya akan terus hidup. Seni budaya ini, memang merupakan warisan leluhur yang diturunkan bagi generasi selanjutnya untuk dilestarikan dan dijaga perkembangannya.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi kita sekalian. Sehingga pertunjukan Wayang Kulit kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Anjungan DIY TMII Jakarta, 13 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMAPARAN HASIL DAN DISKUSI KELOMPOK
TERARAH KAJIAN PEMBIAYAAN KETAHANAN
KESEHATAN DI INDONESIA

Yogyakarta, 8 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati:

- Direktur Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
- Para Peserta Diskusi;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang berbahagia.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul pada acara Pemaparan Hasil dan Diskusi Kelompok Terarah Kajian Pembiayaan Ketahanan Kesehatan di Indonesia dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Perkembangan teknologi, infrastruktur serta transportasi akan memudahkan akses dan mobilitas masyarakat untuk dapat

berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Kemajuan ini membawa dampak, bukan hanya mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, namun bagaimana dua sisi mata uang, juga membawa implikasi terhadap peningkatan risiko ancaman kesehatan masyarakat.

Pemerintah Indonesia selalu memprioritaskan kesehatan dalam agenda pembangunan nasional. Kesehatan merupakan pilar penting dalam pengembangan ketahanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pendekatan multisektoral dalam memperkuat kapasitas nasional, regional juga global, melalui kerjasama antar negara terutama dengan mengadvokasi peran dan partisipasi pemerintah, bersama sektor swasta, dan organisasi sosial.

Di tingkat global, tidak ada satupun negara yang bebas dari ancaman permasalahan kesehatan, apalagi dengan perubahan yang terjadi secara terus menerus, tentu mengharuskan setiap negara untuk lebih proaktif dan adaptif untuk menghadapi tantangan kesehatan global yang sangat beragam di masa mendatang.

Seiring berjalannya waktu, dinamika dan interaksi berbagai faktor sangat mempengaruhi, misalnya mobilitas tinggi yang dihasilkan dari peningkatan transportasi, pariwisata dan ekonomi. Selain itu, perubahan iklim, penggunaan pestisida dan antibiotika yang berlebihan ditambah dengan gaya hidup yang tidak sehat juga dapat memperburuk ancaman terhadap kesehatan global.

Adanya *Global Health Security Agenda (GHSA)* merupakan sebuah inisiatif bersama dari negara-negara yang menginginkan dunia menjadi lebih aman dan tangguh dalam menghadapi munculnya *emerging infectious disease outbreaks* (penyakit infeksi menular baru) dan ancaman kesehatan masyarakat lainnya, seperti bahaya nuklir, kimia dan radioaktif. Strategi kerja sama dalam GHSA difokuskan pada upaya

penguatan kapasitas nasional setiap negara, khususnya dalam melakukan pencegahan, deteksi dan penanggulangan penyebaran penyakit.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan mendukung sepenuhnya Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan World Bank yang telah melaksanakan penelitian dan pengkajian pembiayaan ketahanan kesehatan untuk mengetahui kesiapsiagaan ketahanan kesehatan baik dari sektor kesehatan dan lintas sektor di Yogyakarta.

Hasil penelitian dan pengkajian tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemda DIY dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pemenuhan *Global Health Security Agenda* (GHSA) khususnya yang berkaitan dengan identifikasi komponen pembiayaan daerah untuk ketahanan kesehatan, identifikasi koordinasi lintas sektor serta potensi dan hambatan dalam pembiayaan dan pelaksanaan ketahanan kesehatan di DIY.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
P E M B U K A A N
GELAR SENI DESA/KELURAHAN BUDAYA
“SELASA WAGEN”
Yogyakarta, 09 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati, Bapak/Ibu, Tamu Undangan serta Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puja puji dan syukur ke hadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul di Plaza Monumen Serangan Oemoem 1 Maret Yogyakarta, untuk menghadiri dan menyaksikan rangkaian Pembukaan Gelar Seni Desa/Kelurahan Budaya “Selasa Wagen”, dalam rangka upaya pengembangan Desa Budaya Tahun 2019 yang diselenggarakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui gelar potensi unggulan Desa/Kelurahan Budaya setiap hari Selasa Wage, dari bulan April sampai dengan bulan Desember 2019.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Kebudayaan merupakan salah satu pilar pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), selain pendidikan dan pariwisata. Sehingga kebudayaan memiliki posisi penting, apalagi pascaditetapkannya Undang Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, posisi kebudayaan semakin kuat karena kebudayaan menjadi payung atau sebagai pengarusutamaan pembangunan disegala bidang.

DIY memang kaya akan budaya, sangat menarik dan sangat memikat di mata dunia. Dalam perkembangannya kekayaan budaya tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa, tetapi sebenarnya telah menjadi falsafah jalan hidup (*way of live*) masyarakat sejak berabad-abad silam hingga sekarang.

Akal dan budi penduduk yang sangat kreatif dan inovatif, mampu melahirkan budaya yang bernilai seni tinggi dan diapresiasi oleh kalangan internasional, bahkan mendapatkan pengakuan UNESCO diantaranya wayang, keris dan batik. Untuk itu, pembangunan kebudayaan di DIY ditujukan untuk melindungi dan mengembangkan kebudayaan, membentuk identitas diri atau jati diri masyarakat, serta memanfaatkan kebudayaan sebagai potensi ekonomi kreatif yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan.

Hadirin dan Saudara sekalian,

Tak kenal maka tak sayang, maka kegiatan Gelar Seni Desa/Kelurahan Budaya “Selasa Wagen” ini, bisa lebih meningkatkan apresiasi masyarakat dan pelestarian warisan budaya yang ada di DIY. Harapannya, akan semakin meningkatkan identitas Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya yang dimiliki, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya peninggalan para leluhur.

Dengan mengetahui aset-aset kekayaan budaya bangsa bernilai tinggi ini, budaya peninggalan leluhur dapat kita gunakan sebagai penyaring kebudayaan asing yang belum tentu sesuai dengan masyarakat kita. Maka sebagai upaya ke depan, Saya menghimbau kepada penyelenggara dan pihak-pihak terkait lainnya, agar lebih gencar menyelenggarakan kegiatan serupa dalam rangka memasyarakatkan dan melestarikan budaya. Karena jika hal-hal seperti ini dapat terealisasi dengan baik, saya optimis, keberadaan warisan budaya yang ada di Indonesia khususnya DIY dan potensi budayanya akan lebih maju dan berkembang dengan lebih baik lagi.

Saya berharap pelaksanaan Gelar Seni Desa/Kelurahan Budaya ini dapat memacu kreativitas masyarakat DIY untuk terus berkreasi, sehingga dapat lebih menumbuhkembangkan pariwisata. Gelaran ini juga akan menjauhkan masyarakat dari budaya kekerasan yang akhir-akhir ini marak. Dan sebagai upaya ke depan, Pemda DIY akan senantiasa mendukung kreasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang berbasis kebudayaan.

Hadirin dan Saudara sekalian yang Saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat dan sukses Gelar Seni Desa/Kelurahan Budaya, semoga kegiatan berbasis budaya ini dapat memacu kreativitas masyarakat untuk terus berkreasi, dan selanjutnya perasaan dan hati kita terasah dan menjadi semakin halus.

Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, pada hari ini, Selasa Wage, 09 April 2019, Gelar Seni Desa/Kelurahan Budaya “Selasa Wagen”, secara resmi saya buka dan dimulai.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
P E M B U K A A N
PERTEMUAN KOORDINASI PENINGKATAN EFEKTIVITAS
PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
Yogyakarta, 04 April 2019

Assalamu 'alaikum, Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Kepala Balai Besar POM Yogyakarta;
- Para Narasumber;
- Bapak/Ibu, serta Tamu Undangan yang berbahagia,

Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat *Allah SWT*, karena hanya atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya, kita semua berada dalam keadaan sehat wal-afiat, sehingga pada hari ini dapat menghadiri pembukaan Pertemuan Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Saudara-saudara sekalian,

Pengawasan obat dan makanan bersifat strategis dan berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, serta merupakan upaya melawan kejahatan kemanusiaan. Pengawasan obat dan makanan bahkan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, karena tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, bahkan ketahanan bangsa.

Pada Aspek Kesehatan, pengawasan dilakukan untuk mengawal kualitas hidup manusia Indonesia melalui Jaminan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu obat dan makanan. Aspek Sosial/Kemanusiaan, ditujukan untuk mengawal bonus demografi, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah dibidang kesehatan. Sementara Aspek Ekonomi, untuk mendorong daya saing produk, mencegah hilangnya pemasukan negara dari pajak, distorsi pasar akibat peredaran produk illegal dan penyelundupan obat dan makanan. Serta Aspek Keamanan/Ketertiban Masyarakat, untuk mencegah penyalahgunaan obat keras dan bioterrorism. Dengan demikian, pengawasan obat dan makanan merupakan hal yang multisektor dan multilevel pemerintahan. Sehingga dalam hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) perlu memperkuat kelembagaan dan menjalin kemitraan dengan instansi terkait.

Keterlibatan semua pihak tanpa kecuali, sangat dibutuhkan dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan. Peran serta pemangku kepentingan juga sangat diperlukan, mengingat begitu luasnya wilayah yang harus diawasi, dan juga semakin kompleksnya spektrum isu pengawasan terkait obat dan makanan, serta semakin berkembangnya pola-pola baru baik produksi maupun peredaran obat dan makanan yang tidak terstandar atau bahkan illegal. Kiranya multisektor pengawasan obat dan makanan memainkan peran strategis yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan obat dan

makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional.

Bapak/Ibu, Tamu Undangan yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap, dalam pertemuan koordinasi yang digelar ini, mampu mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang tangguh, dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di lapangan, sekaligus terjalin sinergisme kegiatan terkait pengawasan obat dan makanan di Lingkungan Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, agar bisa meningkatkan jaminan keamanan obat dan makanan untuk mendukung kualitas pembangunan manusia, khususnya di wilayah DIY.

Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucap *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Pertemuan Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, pada hari ini, Kamis Wage, 04 April 2019, secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, serta senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Nya. Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN V
DAN VI
BADAN DIKLAT DIY TAHUN 2019
Gunung Sempu, 29 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Para Pengelola, Widyaiswara, Instruktur Bandiklat yang saya hormati;

Para peserta Diklat Prajabatan yang saya banggakan,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saudara-saudara sekalian,

PNS sebagai unsur utama [sumber daya manusia](#) Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada

negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil PNS di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan dasar (Latsar) yang mengarah kepada upaya peningkatan: 1) Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air; 2) Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya; 3) Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Latsar CPNS bertujuan:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Selain itu, sesuai dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa,

transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi praktek-praktek KKN atau yang lebih populer dengan istilah "*Good Governance*". Untuk itulah, maka yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pemberian pelayanan prima.

Dengan diselenggarakannya Pelatihan Dasar pada saat ini, maka akan mempunyai arti yang sangat strategis, karena saudara sekalian akan lebih siap guna memikul tanggung jawab yang lebih berat dengan peningkatan kemampuan intelektual ataupun emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dan pengabdian agar lebih baik. Dapat meningkatkan keahlian-keahlian, pengalaman, pengetahuan dan sikap/perilaku yang lebih baik. Sehingga akan meningkatkan wawasan, profesionalisme dan kompetensi saudara sekalian, terutama dalam menempatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, saya menaruh harapan yang besar kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS ini, nantinya agar mampu menjadi PNS yang visioner, kreatif, berkualitas, serta mampu menjadi pionir bagi kemaslahatan masyarakat. Mampu mensinergikan semangat pengabdian dengan peningkatan kemampuan kerja yang berakar dari ilmu, pengetahuan, serta wawasan yang saudara dapatkan dan kuasai dari pelaksanaan Pelatihan ini, semua itu kita harapkan ke depan akan bermuara pada peningkatan prestasi kerja saudara di instansinya masing-masing.

Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bahan perenungan kita bersama serta dapat lebih memberikan kita motivasi dalam melaksanakan setiap tugas dan amanah yang sudah dipercayakan dipundak saudara-saudara sekalian.

Demikian yang dapat saya sampaikan, Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan V dan VI Badan Diklat DIY Tahun 2019, secara resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gunung Sempu, 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
P E M B U K A A N
PELATIHAN DASAR
CPNS GOLONGAN II DAN III ANGKATAN I
BADAN DIKLAT DIY TAHUN 2018
Gunungsempu, 5 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Para Pengelola, Widyaiswara, Instruktur Bandiklat yang saya hormati;
- Para peserta Diklat Prajabatan yang saya banggakan,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saudara-saudara sekalian,

Kita semua menyadari bahwa sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), wajib disertakan dalam Pelatihan Dasar selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. CPNS wajib mengikuti dan lulus Pelatihan Dasar untuk dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

PNS sebagai unsur utama [sumber daya manusia](#) Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil PNS di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan dasar (Latsar) yang mengarah kepada upaya peningkatan: 1) Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air; 2) Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya; 3) Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 101 Tahun 2000, Latsar CPNS bertujuan:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi;
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir, dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Selain itu, sesuai dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi praktek-praktek KKN atau yang lebih populer dengan istilah "*Good Governance*". Untuk itulah, maka yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur, agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi, dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pemberian pelayanan prima.

Dengan diselenggarakannya Pelatihan Dasar pada saat ini, maka akan mempunyai arti yang sangat strategis, karena Saudara sekalian akan lebih siap guna memikul tanggung jawab yang lebih berat dengan peningkatan kemampuan intelektual ataupun emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dan pengabdian agar lebih baik. Dapat meningkatkan keahlian-keahlian, pengalaman, pengetahuan dan sikap/perilaku yang lebih baik. Sehingga akan meningkatkan wawasan, profesionalisme dan kompetensi Saudara sekalian, terutama dalam menempatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, saya menaruh harapan yang besar kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS ini, nantinya agar mampu menjadi PNS yang visioner, kreatif, berkualitas, serta mampu menjadi pionir bagi kemaslahatan masyarakat. Mampu menyinerjikan semangat pengabdian dengan peningkatan kemampuan kerja yang berakar dari ilmu, pengetahuan, serta wawasan yang saudara dapatkan dan kuasai dari pelaksanaan Pelatihan ini, semua itu kita

harapkan ke depan akan bermuara pada peningkatan prestasi kerja Saudara di instansinya masing-masing.

Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bahan perenungan kita bersama serta dapat lebih memberikan kita motivasi, dalam melaksanakan setiap tugas dan amanah yang sudah dipercayakan dipundak Saudara-saudara sekalian.

Demikian yang dapat saya sampaikan, Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III Angkatan I Badan Diklat DIY Tahun 2019, secara resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gunungsempu, 5 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN V
DAN VI
BADAN DIKLAT DIY TAHUN 2019
Gunung Sempu, 29 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Para Pengelola, Widyaiswara, Instruktur Bandiklat yang saya hormati;

Para peserta Diklat Prajabatan yang saya banggakan,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Saudara-saudara sekalian,

PNS sebagai unsur utama [sumber daya manusia](#) memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang memiliki kompetensi yang diindikasikan dari sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada

negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawab sebagai pelayan publik, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk dapat membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil di atas, perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan dasar (Latsar) yang mengarah kepada upaya peningkatan: 1) Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air; 2) Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya; 3) Efisiensi, efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, Latsar CPNS bertujuan:

1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan instansi.
2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Selain itu, sesuai dengan tuntutan reformasi, yang menghendaki terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tekad memerangi praktek-praktek KKN atau yang lebih populer dengan istilah "*Good Governance*". Untuk itulah, maka yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas profesionalisme aparatur agar memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh etika birokrasi dalam memberi pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan pemberian pelayanan prima.

Dengan diselenggarakannya Pelatihan Dasar pada saat ini, maka akan mempunyai arti yang sangat strategis, karena saudara sekalian akan lebih siap guna memikul tanggung jawab yang lebih berat dengan peningkatan kemampuan intelektual ataupun emosional yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dan pengabdian agar lebih baik. Dapat meningkatkan keahlian-keahlian, pengalaman, pengetahuan dan sikap/perilaku yang lebih baik. Sehingga akan meningkatkan wawasan, profesionalisme dan kompetensi saudara sekalian, terutama dalam menempatkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, saya menaruh harapan yang besar kepada peserta Pelatihan Dasar CPNS ini, nantinya agar mampu menjadi PNS yang visioner, kreatif, berkualitas, serta mampu menjadi pionir bagi kemaslahatan masyarakat. Mampu mensinerjikan semangat pengabdian dengan peningkatan kemampuan kerja yang berakar dari ilmu, pengetahuan, serta wawasan yang saudara dapatkan dan kuasai dari pelaksanaan Pelatihan ini, semua itu kita harapkan ke depan akan bermuara pada peningkatan prestasi kerja saudara di instansinya masing-masing.

Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi bahan perenungan kita bersama serta dapat lebih memberikan kita

motivasi dalam melaksanakan setiap tugas dan amanah yang sudah dipercayakan dipundak saudara-saudara sekalian.

Demikian yang dapat saya sampaikan, Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan V dan VI Badan Diklat DIY Tahun 2019, secara resmi saya nyatakan dibuka.

Sekian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gunung Sempu, 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN PERTEMUAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Yogyakarta, 24 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati, Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kemenko PMK;

Yang saya hormati, Para narasumber;

Hadirin dan Para Peserta Pertemuan yang berbahagia,

Pada hari yang *Insyah Allah* penuh berkah ini, marilah kita senantiasa panjatkan puja puji dan syukur ke hadirat *Allah SWT*, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita, kepada bangsa dan negara tercinta ini.

Hanya atas limpahan rahmat serta karunia-Nya pula, saat ini kita dapat berkumpul menghadiri kegiatan Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Kita ketahui bersama, risiko PTM menjadi semakin tinggi karena transisi demografi, yaitu semakin meningkatnya proporsi dan jumlah penduduk dewasa, serta lanjut usia yang rentan terhadap PTM dan penyakit degeneratif.

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan prevalensi kanker di DIY menempati peringkat pertama se-Indonesia yaitu sebesar 4,9%. Selain itu, stroke dan hipertensi menempati peringkat kedua. Sedangkan diabetes melitus (DM) dan penyakit jantung berada pada peringkat ketiga se-Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tentunya harus diupayakan penguatan peran masyarakat agar lebih bertanggung jawab atas derajat kesehatannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam menyadarkan dan menumbuhkan kemampuan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM). Hal ini menjadi sangat penting dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Meningkatnya PTM akan dapat menurunkan produktivitas sumber daya manusia, bahkan kualitas generasi bangsa. Hal ini turut berdampak pula pada besarnya beban pemerintah karena penanganan PTM membutuhkan biaya yang besar. Padahal PTM yang diidap oleh sebagian masyarakat sebenarnya bisa dicegah dengan menerapkan pola gerakan masyarakat hidup sehat. Masyarakat bisa memulai dengan melakukan aktifitas fisik,

mengonsumsi sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi alkohol, memeriksa kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan, dan menggunakan jamban.

Selain itu masyarakat juga mesti menciptakan perilaku hidup cerdas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, meliputi cek kesehatan rutin, menghilangkan asap rokok dan polusi udara lainnya, rajin beraktivitas fisik dan olahraga, diet dengan gizi seimbang, istirahat yang cukup, serta kuatkan iman dan kelola stres.

Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk membudayakan hidup sehat dan mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku tidak sehat. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mengurangi beban biaya kesehatan. Hal itu mengingat kesehatan menjadi modal utama dari masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini suatu hal yang sangat penting bagi kita, karena sehat itu sangat mahal harganya. Maka gerakan masyarakat hidup sehat ini sangat baik bagi masyarakat. Dengan kondisi masyarakat yang sehat rencana-rencana dan berbagai program pembangunan menjadi lebih mudah dan efektif dilaksanakan. Dengan demikian, faktor kesehatan menjadi tumpuan utama dalam proses pembangunan dan kemajuan bangsa. Tanpa masyarakat yang sehat, aktivitas kita untuk pembangunan terkendala dan menjadi terganggu.

Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami berharap, dalam pertemuan ini kita semua memperoleh gambaran yang jelas, sehingga bisa lebih

meningkatkan apa-apa yang sudah dicapai, dan memperbaikinya jika tidak sesuai dengan tujuan. Selanjutnya mendorong masyarakat yang masih cenderung abai terhadap kondisi kesehatan tubuh, sekaligus mendorong meningkatkan partisipasi masyarakat ikut serta dalam menerapkan perilaku hidup sehat, yang selama ini masih sangat rendah.

Hadirin dan Saudara sekalian yang saya hormati,

Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) di Daerah Istimewa Yogyakarta, secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar, serta senantiasa mendapatkan petunjuk dan bimbingan-Nya. Amin.

Salam Sehat, Salam Germas. Sehat Diawali dari Kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PEMBUKAAN
RAPAT KOORDINASI UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA SE-DIY DAN BIMBINGAN TEKNIS
PENGADAAN BARANG/JASA

Yogyakarta, 29 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang Kami hormati,

- Inspektur se-DIY;
- Kepala BKD/BKPP se-DIY;
- Kepala Bappeda se-DIY;
- Kepala DPKA/BPKAD se-DIY;
- Kepala Biro/bagian Hukum se-DIY;
- Kepala Biro/bagian Organisasi se-DIY;
- Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan;
- Bapak/Ibu, Tamu Undangan, Para Peserta Rapat Koordinasi UKPBJ se-DIY dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Alhamdulillah mengawali sambutan ini, Saya mengajak kepada seluruh hadirin sekalian, untuk selalu mengucapkan puji dan syukur yang selalu kita agungkan kehadiran Allah *Subhanahu Wata'ala* - Tuhan Yang Maha Esa, berkat bimbingan

dan petunjuk-Nya, kita senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta berkesempatan hadir dan berkumpul di tempat ini dalam acara Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa se-DIY dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.

Pertama-tama, Saya ucapkan terimakasih kepada panitia penyelenggara Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa se-DIY dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa, sehingga harapannya pertemuan kali ini bisa menjadi ajang silaturahmi, tukar pikiran, *sharing* pengetahuan, dan pembelajaran bersama terkait dengan kematangan UKPBJ dan pembinaan SDM pengadaan.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa, maka Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang disingkat UKPBJ.

UKPBJ adalah transformasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diantaranya memiliki peran melakukan pembinaan, pemilihan penyedia dan pengelolaan sistem informasi. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengamanatkan Kepala Daerah untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Tugas dan fungsi UKPBJ menurut pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah:

1. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;

2. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. Pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
4. Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan atau bimbingan teknis; serta,
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Dalam Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, salah satu tugas UKPBJ adalah mengukur tingkat kematangan organisasi UKPBJ yang kemudian dijabarkan dalam peta jalan untuk mencapai UKPBJ sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Para Peserta Rapat yang berbahagia,

Pengadaan Barang/Jasa harus dijalankan sesuai dengan prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Prinsip pengadaan tersebut dapat dicapai bila aspek SDM dan kelembagaan, dalam hal ini kelembagaan UKPBJ sudah harus mencapai level proaktif yaitu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi penguatan fungsi perencanaan bersama seluruh *stakeholder*.

Adanya level tersebut dapat menjadikan UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia, dan DIY pada khususnya.

Selanjutnya, tujuan dari Rapat Koordinasi UKPBJ se-DIY dan Bimbingan Teknis Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa ini adalah silaturahmi, tukar pikiran, sharing pengetahuan, dan pembelajaran bersama dalam hal:

1. Pengukuran Kematangan Organisasi UKPBJ yang telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Penghitungan Formasi dan Beban Kerja, serta aturan terkait Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Marilah secara bersama-sama kita bahu membahu, semua pelaku dan pelaksana pengadaan barang/jasa untuk membulatkan tekad dalam rangka menciptakan pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.

Akhir kata, dengan disertai rasa syukur memohon ridho-Nya dan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa se-DIY dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa, Saya nyatakan dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amien.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Yogyakarta, 9 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Pimpinan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, beserta seluruh rombongan;
- Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi dalam rangka penerimaan Kunjungan Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pengelola AKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat ke DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan “*selamat datang dan terimakasih*” atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian untuk berkunjung ke Yogyakarta. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu dengan seoptimal mungkin.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Terkait dengan materi kunjungan kali ini, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dapat saya sampaikan bahwa SAKIP Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta seluruh OPD untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sekaligus juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja setiap instansi di tahun yang akan datang.

Semua ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Oleh karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Negara kita. Karena dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*. Untuk itulah diperlukan adanya sumber daya manusia yang handal guna mewujudkan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik ini.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Untuk itulah, maka dalam kerangka penciptaan *good governance*, kondisi ideal yang dilaksanakan di DIY yaitu semua kegiatan organisasi pemerintahan telah dilaksanakan secara

terarah dan terukur, termasuk kaitannya dengan kegiatan pembinaan serta pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah DIY telah berhasil 4 (empat) kali memperoleh nilai A serta terakhir memperoleh nilai AA dalam penilaian Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2018 dari Kementerian PAN dan RB RI, serta 8 (delapan) kali berturut-turut Pemerintah DIY memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai dari LKPD TA 2010 sampai dengan LKPD TA 2017. Sedangkan untuk 2018 sedang proses pemeriksaan BPK dan kami berharap untuk LKPD TA 2018 ini dapat tetap mempertahankan opini WTP tersebut.

Pemerintah DIY juga pernah menerima predikat rangking pertama provinsi dengan kinerja pemerintahan terbaik seluruh Indonesia, dari hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2015. Penilaian diberikan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemda (EKPPD) 2013. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai tingkat kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi antar suatu daerah dengan daerah lainnya secara regional dan nasional.

Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada diskusi ini. Selanjutnya untuk pembahasan materi kunjungan lebih jauh secara teknis, terperinci dan mendalam maka dapat di bahas pada diskusi selanjutnya dengan instansi/OPD terkait. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Yogyakarta, 23 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Pimpinan Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, beserta seluruh rombongan;
- Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi dalam rangka penerimaan Kunjungan Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pengelola AKIP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat ke DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan “*selamat datang dan terimakasih*” atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian untuk berkunjung ke Yogyakarta. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu dengan seoptimal mungkin.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Terkait dengan materi kunjungan kali ini, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dapat saya sampaikan bahwa SAKIP Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta seluruh OPD untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sekaligus juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja setiap instansi di tahun yang akan datang.

Semua ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Oleh karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Negara kita. Karena dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*. Untuk itulah diperlukan adanya sumber daya manusia yang handal guna mewujudkan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik ini.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Untuk itulah, maka dalam kerangka penciptaan *good governance*, kondisi ideal yang dilaksanakan di DIY yaitu semua kegiatan organisasi pemerintahan telah dilaksanakan secara

terarah dan terukur, termasuk kaitannya dengan kegiatan pembinaan serta pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah DIY telah berhasil 4 (empat) kali memperoleh nilai A serta terakhir memperoleh nilai AA dalam penilaian Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2018 dari Kementerian PAN dan RB RI, serta 8 (delapan) kali berturut-turut Pemerintah DIY memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai dari LKPD TA 2010 sampai dengan LKPD TA 2017. Sedangkan untuk 2018 sedang proses pemeriksaan BPK dan kami berharap untuk LKPD TA 2018 ini dapat tetap mempertahankan opini WTP tersebut.

Pemerintah DIY juga pernah menerima predikat rangking pertama provinsi dengan kinerja pemerintahan terbaik seluruh Indonesia, dari hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2015. Penilaian diberikan setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemda (EKPPD) 2013. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai tingkat kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi antar suatu daerah dengan daerah lainnya secara regional dan nasional.

Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada diskusi ini. Selanjutnya untuk pembahasan materi kunjungan lebih jauh secara teknis, terperinci dan mendalam maka dapat di bahas pada diskusi selanjutnya dengan instansi/OPD terkait. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
Yogyakarta, 4 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Tulungagung; Ir. Indra Fauzi, MM, beserta seluruh rombongan,
- Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dan berdiskusi dalam rangka penerimaan Kunjungan Study Referensi Pemerintah Kabupaten Tulungagung ke DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya mengucapkan "*selamat datang dan terimakasih*" atas kehadiran Bapak/Ibu sekalian untuk berkunjung ke Yogyakarta. Semoga kunjungan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu dengan seoptimal mungkin.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Terkait dengan materi kunjungan kali ini, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka dapat saya sampaikan bahwa SAKIP Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta seluruh OPD untuk mewujudkan adanya akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sekaligus juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja setiap instansi di tahun yang akan datang.

Semua ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Oleh karena itu, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Negara kita. Karena dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka akan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*. Untuk itulah diperlukan adanya sumber daya manusia yang handal guna mewujudkan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Untuk itulah, maka dalam kerangka penciptaan *good governance*, kondisi ideal yang dilaksanakan di DIY yaitu semua kegiatan organisasi pemerintahan telah dilaksanakan secara

terarah dan terukur, termasuk kaitannya dengan kegiatan pembinaan serta pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah DIY telah berhasil memperoleh nilai AA dalam penilaian Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2018 dari Kementerian PAN dan RB RI.

Demikian sekiranya yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar pada diskusi ini. Selanjutnya untuk pembahasan materi kunjungan lebih jauh secara teknis, terperinci dan mendalam maka dapat di bahas pada diskusi selanjutnya dengan instansi/OPD terkait. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
P E N U T U P A N
PERTANDINGAN LIGA PEKERJA (LIPESIA) DIY
Pandowoharjo Sleman, 27 April 2019

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Ketua Umum KONI DIY;
- Para Oficial, Pembina, Pelatih; serta Para Pemain Liga Pekerja (LIPESIA) DIY, yang saya banggakan;
- Hadirin Tamu Undangan yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya saya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan Liga Pekerja (LIPESIA) DIY tahun 2019. Dengan harapan kegiatan ini dapat mencetak atlet pekerja yang kedepan akan mampu berkiprah secara nasional. Sekaligus dapat memberikan motivasi bagi pekerja untuk lebih mencintai olahraga. Serta sebagai ajang mempererat jalinan tali silaturahmi

antar pekerja dan memberikan hiburan tontonan menarik secara langsung bagi masyarakat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita bersama-sama menyadari bahwa keberhasilan pembinaan atlet olahraga dapat dipantau dari prestasi yang dicapai pada suatu kejuaraan, betapapun bagus program latihan yang diterapkan, jika dalam kejuaraan tidak dapat mencatat prestasi, maka pembinaan belum dapat dikatakan berhasil. Untuk mewujudkan kenyataan tersebut maka kejuaraan pada LIPESIA ini, sekiranya merupakan tempat untuk membuktikan tingkat prestasi yang akan diraih oleh para atlet/pemain sepak bola pekerja di DIY serta tingkat keberhasilan para pelatih di dalam melakukan pembinaan.

Saat ini kompetisi olahraga semakin ketat dan keras. Hanya dengan keuletan dan kerja keraslah prestasi gemilang olahraga dapat kita wujudkan. Seperti pada ajang LIPESIA dapat menjadi ajang puncak prestasi bagi para atlet pekerja kita, karena ajang tersebut merupakan barometer untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam pembinaan olahraga, terlebih pada ajang yang dipertandingkan pada tingkat DIY atau yang lebih tinggi.

Sesuai dengan jiwa yang terkandung di dalam olahraga yaitu sportivitas, maka para atlet/pemain sepak bola pekerja, diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai sportivitas. Memang harus berusaha secara maksimal untuk meraih prestasi terbaik, tetapi jangan sampai prestasi tersebut tercoreng dengan perbuatan yang menyimpang dari unsur sportivitas, dengan menjunjung permainan yang bersih dan cantik pasti akan diperoleh hasil yang sempurna.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Pertandingan Liga Pekerja (LIPESIA) DIY Tahun 2019, dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Selanjutnya saya sampaikan ucapan “Selamat” kepada Tim Perusahaan yang telah memperoleh prestasi dengan dapat memboyong Tropy Gubernur DIY. Dan kepada Tim yang belum berhasil mendapatkan prestasi untuk lebih meningkatkan pola latihan dan pola permainan, sehingga dimasa yang akan datang diharapkan akan dapat menorehkan prestasi. Semoga Tuhan selalu meridhoi segala upaya dan kerjakeras kita semua.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pandowoharjo Sleman, 27 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
PENYERAHAN SK PENGANGKATAN CPNS
PEMERINTAH DAERAH DIY FORMASI 2018
Yogyakarta 4 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
- Para penerima SK CPNS Pemda DIY yang saya banggakan,

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan acara Penyerahan SK CPNS formasi tahun 2018 sebanyak 758 CPNS Pemda DIY, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya atas nama Pimpinan Pemerintah Daerah DIY, saya menyampaikan ucapan "Selamat" kepada saudara-saudara sekalian yang pada hari ini menerima SK pengangkatan sebagai CPNS. Dengan menerima SK ini saudara-saudara sekalian diharapkan dapat menunjukkan kualitas kinerja pada instansinya masing-masing. Karena CPNS adalah proses yang harus dilalui sebagai masa percobaan sebelum diangkat menjadi PNS, jadi jangan sampai kinerja dan kedisiplinan justru menjadi menurun setelah menjadi CPNS.

Saudara-saudara sekalian,

Pemerintah Daerah DIY telah memegang teguh dasar filosofi dalam rangka melaksanakan pembangunan DIY, yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana*, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan *nilai budaya daerah* yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Dengan dasar filosofi tersebut maka kondisi yang ingin dicapai yaitu *Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan didalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah*. Berdasarkan kondisi ini maka ditetapkan langkah untuk menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya, profesional, transparan dan akuntabel, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur melalui pemberian pelayanan secara prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, hal utama yang harus diperhatikan adalah apa yang sebenarnya masyarakat harapkan dari Pemerintah Daerah dan apa yang Pemerintah Daerah dapat agendakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hadirin dan saudara-saudara sekalian,

Tujuan tersebut telah diperkuat dengan ditetapkannya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Keistimewaan ini merupakan keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus Kewenangan Istimewa. Merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Ada lima Kewenangan dalam urusan Keistimewaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012, pada Pasal 7 ayat 4 yaitu mencakup: (a) tatacara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata ruang.

Pengaturan kewenangan dalam urusan Keistimewaan bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin kebhinekatunggalikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menciptakan pemerintahan yang baik, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya.

Kebudayaan sebagai salah satu aspek keistimewaan DIY harus mampu pembentuk manusia utama, sehingga akan mempunyai idealisme, komitmen yang tinggi, integritas moral, nurani yang bersih. Dengan kebudayaan akan memberikan keseimbangan hidup, bagaimana menjaga keseimbangan antara perubahan dan mempertahankan nilai-nilai luhur dalam

perkembangan peradaban modern yang memang tidak bisa kita tolak.

Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY juga harus dilaksanakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli, sesuai peraturan perundang-undangan.

Hadirin dan saudara-saudara sekalian,

Selanjutnya pada kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa sebagai seorang CPNS maka saudara-saudara diharapkan selalu berkomitmen untuk mematuhi dan berpedoman pada peraturan tentang larangan dan kewajiban disiplin bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, untuk dijalankan secara konsisten dan konsekuen. Sekaligus mampu mensinergikan semangat pengabdian dengan peningkatan kemampuan kerja yang berakar dari ilmu pengetahuan serta wawasan yang saudara dapatkan dan kuasai, semua itu ke depan diharapkan akan dapat bermuara pada peningkatan prestasi kerja saudara sendiri. Tingkatkan kepekaan dalam mencermati setiap keadaan yang tengah kita hadapi pada waktu sekarang ini, serta mampu merubah setiap tantangan menjadi peluang yang terbaik.

Kembangkanlah keterampilan manajemen, baik konseptual (*conceptual skill*), interaksi antara sesama rekan (*human relation skill*), dan kemampuan teknis (*technical skill*). Karena kompleksitas dalam mengelola pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saudara, mau tidak mau membutuhkan kemampuan manajemen yang baik agar terbentuk sikap kemandirian dalam bekerja, mampu bekerja sama dalam *teamwork*, dan mampu mengelola tugas dan tanggung jawab secara terencana sampai berhasil.

Sebagai aparatur Pemerintah Daerah DIY, saudara-saudara juga diharapkan dapat membangun pola pikir, sikap dan perilaku sehari-hari dalam bekerja dan berinteraksi dengan memperhatikan sikap SATRIYA sebagai watak yang memiliki sikap memegang teguh ajaran moral “*sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh*” (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggungjawab). Sifat-sifat inilah yang diharapkan dapat menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya.

Adapun SATRIYA sebagai akronim terdiri atas Selaras, Akal budi luhur-jatidiri, Teladan-keteladanan, Rela Melayani, Inovatif, Yakin dan percaya diri, serta Ahli-profesional. Selanjutnya sebagai pedoman sikap dan perilaku aparatur pemerintah di lingkungan Daerah DIY, masing-masing kata dalam singkatan tersebut diberikan indikator sehingga dapat mempermudah dalam pelaksanaan dan evaluasinya.

Hal ini dalam rangka mempersiapkan SDM Pemerintah Daerah DIY untuk menjadi birokrat yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik serta sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. Sekaligus diharapkan untuk selalu mengembangkan adanya inovasi dalam melaksanakan layanan kepada masyarakat dengan mengutamakan pelayanan birokrasi yang tepat, dan berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekaian,

Demikian saya sampaikan. Sekali lagi “Selamat”, bekerjalah dan berkaryalah dengan penuh dedikasi, kejujuran dan keikhlasan, karena karya-karya saudara-saudara sekalian adalah bukan hanya bentuk pertanggungjawaban kepada bangsa dan negara saja, namun terlebih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

SAMBUTAN
PERESMIAN TEMPAT KHUSUS PARKIR
BESKALAN YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Bapak, Ibu, Hadirin sekalian yang kami hormati,

Pada kesempatan yang *Insyaa Allah* penuh berkah ini, kami mengajak hadirin sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat *Allah SWT*, karena sampai dengan hari ini kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, sehingga bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri Peresmian Tempat Khusus Parkir (TKP) Beskalan Yogyakarta.

Hadirin sekalian,

Minimnya lahan parkir di kawasan Malioboro menjadi persoalan tersendiri. Bila sentra pedagang kali lima (PKL) yang dibangun dibekas eks Bioskop Indra terbangun, maka diperlukan kawasan parkir yang letaknya tidak terlampau jauh.

Tempat Khusus Parkir (TKP) di sirip-sirip jalan Malioboro, sangat diperlukan sebelum nantinya kawasan Malioboro resmi ditetapkan sebagai kawasan semi pedestrian. Hal itu bertujuan untuk memberikan akses lebih pada wisatawan yang berkunjung. Artinya penambahan [kantong parkir](#) di kawasan Malioboro saat ini bersifat mendesak. Jadi, yang harus dipersiapkan sebelum Malioboro ditetapkan sebagai kawasan semi pedestrian, kantong-kantong parkir di sirip-sirip Malioboro harus diperbanyak. Kami menilai mengoptimalkan sirip-sirip Malioboro untuk dijadikan [kantong parkir](#), merupakan pilihan logis yang bisa ditempuh Pemda DIY, dengan harapan para wisatawan yang datang menggunakan kendaraan pribadi, tidak harus berjalan kaki terlalu jauh.

Salah satu kantong parkir yang telah dibangun untuk mendukung pelaksanaan Malioboro sebagai kawasan semi pedestrian dan siap menampung kendaraan bermotor yang akan parkir, yaitu TKP Beskalan yang terletak di Jalan Beskalan, Ngupasan, Yogyakarta.

Kami berharap TKP Beskalan bisa memecahkan permasalahan parker di kawasan Malioboro. Kami yakin, jika TKP Beskalan beroperasi dengan pengaturan, daya dukung, daya tampung yang tepat, ekonomi dan budaya Malioboro akan meningkat.

Bapak, Ibu, Hadirin sekalian yang kami hormati,

Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucap *Bismillaahirrahmaanirrahiim*, pada hari ini, Kamis Legi, 11 April 2019, Tempat Khusus Parkir Beskalan kami resmikan penggunaannya.

Sekian. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 April 2019

SKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
RAPAT KOORDINASI
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
Yogyakarta, 10 April 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

- Yang kami hormati; Para Narasumber;
- Yang kami hormati; Bapak/Ibu, Segenap Tamu Undangan; Para Peserta Rakor yang kami banggakan.

Pada kesempatan yang membahagiakan dan *Insy Allah* penuh berkah ini, kami mengajak Hadirin dan Saudara sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puja puji dan syukur kehadiran *Allah SWT*, karena sampai dengan hari ini kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mengucapkan *selamat datang* kepada Bapak/Ibu dan Saudara sekalian di kota Yogyakarta. Kota yang tumbuh menjadi salah satu pusat pendidikan, budaya dan pariwisata terkemuka di Indonesia, sekaligus kota unik yang memiliki dua wajah. Di satu sisi adalah simbol tua yang

berbalutkan nilai-nilai tradisi leluhur kerajaan Jawa, di satu sisi lainnya merupakan wajah gemerlap modernitas. Keduanya berjalan beriringan, sehingga Bapak/Ibu dan Saudara-saudara sekalian seperti sedang menelusuri sebuah lorong waktu jika berada di sini.

Merupakan kebanggaan bagi kami karena menjadi tempat Rapat Koordinasi Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Semoga suasana kota kami yang unik, dapat mendukung kelancaran Rapat Koordinasi ini sekaligus meninggalkan kesan yang baik. Kami berharap Bapak/Ibu dan Saudara sekalian, merasa nyaman selama berada di sini dan diwaktu senggang mudah-mudahan bisa menyempatkan diri, untuk menikmati berbagai obyek wisata maupun kuliner yang ada di kota gudeg ini.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu persyaratan penting dalam pembangunan sosial ekonomi. Infrastruktur diperlukan sebagai sarana penghubung, *input*, maupun *output* dari berbagai macam kegiatan sosial dan ekonomi. Sebagai gambaran, pembangunan infrastruktur di wilayah DIY memprioritaskan pendukung pariwisata menyongsong Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulonprogo. Hal itu mengingat persoalan pariwisata di DIY adalah aksesibilitas.

Di wilayah selatan, Pemda DIY mempercepat pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sekaligus melakukan penataan di sejumlah titik. Wilayah barat pembangunan Bedah Menoreh yang menghubungkan Kulonprogo dengan KSPN Borobudur. Pembangunan jalan baru ke KSPN Borobudur dan Bedah Menoreh diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya untuk mengimbangi

Pemerintah Pusat memperlebar jalan utama Ngeplang-Nanggulan-Kalibawang-Borobudur, Pemda DIY membangun kawasan Agroteknopark di Wijimulyo, Nanggulan.

Dalam kaitan itu maka pertumbuhan ekonomi DIY semakin kokoh, yang ditopang oleh akselerasi kinerja investasi seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung. Sehingga penataan infrastruktur di antaranya penambahan aksesibilitas jalan maupun kebutuhan dasar masyarakat, dari tahun ke tahun dapat dikatakan semakin membaik.

Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, hasil kerja Pemda DIY di 2017 misalnya, menunjukkan adanya peningkatan capaian indikator. Indikator yang sudah tercapai lebih dari 100% di antaranya, aksesibilitas jalan di wilayah provinsi, persentase penduduk berakses air minum, persentase penduduk berakses sanitasi yang layak, dan persentase penyelenggaraan jasa konstruksi. Pembangunan infrastruktur di DIY dengan ketercapaian indikator persentase, saat ini telah sesuai dengan pemanfaatan ruang dan persentase penataan ruang pada kawasan keistimewaan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selamat berdiskusi dan berbagi pengetahuan, mudah-mudahan Rapat Koordinasi ini berjalan lancar.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
RAPAT KOORDINASI
PROGRAM INOVASI DESA (PID)
TAHUN ANGGARAN 2019
Eastparc Hotel Yogyakarta, 22 April 2019

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang saya hormati, Para Narasumber;
- Tamu Undangan; serta
- Para Peserta Rakor yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita Panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir dan berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Kita semua menyadari bahwa Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, memperkuat Desa secara total merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dan dihindari dalam upaya untuk mempercepat terwujudnya

kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat sebagai kerangka tujuan otonomi daerah secara mendasar pada masing-masing daerah.

Kemajuan dan kemandirian desa serta kesejahteraan masyarakat desa untuk mendukung terwujudnya otonomi daerah memerlukan suatu kebijakan yang berorientasi terhadap penguatan desa dalam memenuhi kebutuhan desa yang berpihak kepada masyarakat atau warga desa. Oleh karenanya peningkatan penguatan desa memiliki arti yang sangat strategik untuk dilaksanakan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai upaya Pemerintah untuk mewujudkan kemandirian desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini sebagaimana tercermin dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hadirin sekalian,

Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyambut baik kegiatan Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID) DIY Tahun Anggaran 2019 ini. Kegiatan ini penting guna mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan dana desa dengan memberikan

banyak referensi dan inovasi-inovasi pembangunan desa serta merevitalisasi peran pendamping dalam pengembangan potensi ekonomi agar muncul berbagai inovasi penggunaan dana desa. Sebagai upaya guna meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta membangun kapasitas desa yang berkelanjutan.

Apabila kita melihat kembali sejak tahun 2015 hingga 2018 dana desa masih di dominasi untuk kegiatan infrastruktur sedangkan penganggaran untuk peningkatan kualitas SDM masih rendah. Untuk itulah maka dengan kegiatan Rapat Koordinasi dengan tema “*Penguatan Sinergi antar Pemangku Kepentingan dalam Program Inovasi Desa Menuju Desa Maju dan Mandiri*” ini diharapkan dapat membangun sinergi seluruh stakeholders terkait dalam melaksanakan Program Inovasi Desa di DIY, pokok-pokok kebijakan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) serta pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program lingkup PPMD, serta optimalisasi dana desa sesuai dengan kegiatan prioritas dari kebijakan pemerintah pusat.

Sehingga akan tercipta pemerintahan desa yang bertanggung jawab, terbuka dan akuntabel. Dapat mewujudkan kemandirian dan kebebasan untuk mengembangkan dan melaksanakan wewenang yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan indikator pembangunan dalam aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemerintahan, serta kelembagaan kemasyarakatan.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,

Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, Rakor Program Inovasi Desa (PID) Tahun Anggaran 2019, dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih.
Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI



Sekretaris Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan
RAPAT SINERGITAS PROGRAM PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI
MELALUI POLA *SHARING* ANGGARAN TAHUN 2020

Yogyakarta, 22 April 2019

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat malam,

Yang Kami hormati:

- Sekjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI;
- Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi beserta jajarannya;
- Para Bupati Kabupaten Daerah Tujuan (Bupati Lamandau, Bupati Bulungan, Bupati Sukamara, Bupati Paser, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Pali, Bupati Sidrap, Bupati Luwu Timur dan Bupati Muna);
- Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Daerah Asal;
- Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Daerah Tujuan;
- Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketransmigrasian Daerah Asal;
- Kepala Dinas yang membidangi Ketransmigrasian Prov/Kab/Kota Daerah Tujuan;
- Para Hadirin serta Tamu Undangan yang berbahagia;

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita memperoleh kesempatan hadir pada kegiatan Rapat Sinergitas Program Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Melalui Pola *Sharing* Anggaran Tahun 2020.

Pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi RI yang telah menyelenggarakan acara ini di Yogyakarta dan para undangan yang menghadiri acara pada malam hari ini.

Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang Saya hormati,

Memperhatikan pasal 130 PP. No. 3 Tahun 2014 ayat (1) yang berbunyi pelaksanaan transmigrasi merupakan proses pembangunan lintas daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemerintah daerah dimana pelaksanaan transmigrasi minimal melibatkan 2 (dua) pemerintah daerah yakni pemerintah Daerah Tujuan yang menyediakan ruang sekaligus tempat tinggal, tempat berusaha dan tempat bekerja, dan pemerintah Daerah Asal yang menyediakan sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan kebutuhan Daerah Tujuan.

Masing-masing pemerintah daerah harus memperoleh manfaat semaksimal mungkin tanpa merugikan pihak lain. Para pihak berada dalam situasi ketergantungan positif, karena pada dasarnya satu daerah tidak dapat mengembangkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya tanpa kontribusi dari daerah lain.

Dalam kerjasama tersebut, Pemerintah Pusat yaitu Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi dan pemerintah Provinsi berperan sebagai mediator dan fasilitator. Sedangkan perumusan

kebutuhan dan perencanaan program serta pelaksanaannya berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait.

Penyelenggaraan transmigrasi melalui mekanisme Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 363 pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dengan demikian, melalui kerjasama pelaksanaan transmigrasi antar pemda merupakan salah satu cara untuk menjadikan transmigrasi sebagai program bersama yang disusun dan dilaksanakan bersama untuk kepentingan bersama. Melalui kebersamaan tersebut diharapkan transmigrasi dapat memberikan manfaat bersama bagi Daerah Asal, Daerah Tujuan dan kepentingan nasional.

Bagi daerah asal, perpindahan sebagian penduduknya melalui transmigrasi merupakan salah satu upaya mengatasi dampak tekanan kependudukan sekaligus memberikan peluang berusaha dan kesempatan kerja. Sedangkan bagi Daerah Tujuan, dengan menata persebaran penduduk akan tumbuh dan berkembang pusat pertumbuhan sebagai salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah dalam kerangka peningkatan daya saing nasional.

Kerjasama Pelaksanaan Transmigrasi melalui Pola *Sharing Anggaran APBD* menjadi bukti komitmen bersama antara daerah asal dengan daerah tujuan. Provinsi DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur telah memulai kerjasama melalui pola *sharing anggaran APBD* sejak tahun 2015 dan dilanjutkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY yaitu Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul pada

tahun 2018 dan tahun 2019 untuk penempatan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara.

Para peserta rapat yang berbahagia,

Rapat Sinergitas dilaksanakan guna membangun satu kesatuan kerangka berpikir, cara pandang, dan pola sikap para penyelenggara transmigrasi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam memberikan layanan kerjasama antar daerah. Perlu media dialog, diskusi dan saling berbagi informasi potensi calon lokasi transmigrasi yang akan menjadi program sharing anggaran dan potensi SDM daerah asal. Melalui Rapat Sinergitas ini diharapkan akan memperoleh hasil rumusan bersama yang dapat digunakan sebagai bahan kebijakan program pembangunan permukiman dan penempatan transmigrasi tahun 2020.

Semoga dengan diselenggarakannya kegiatan Rapat Sinergitas Program Pembangunan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Melalui Pola Sharing Anggaran Tahun 2020 dapat bermanfaat bagi para penyelenggara baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan ketransmigrasian sesuai dengan potensi, sumberdaya alam, dan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan transmigrasi yang merupakan urusan pilihan diharapkan akan memberikan manfaat maksimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dengan harapan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi suksesnya pembangunan transmigrasi di seluruh Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. GATOT SAPTADI